

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” ditulis oleh Elisa Dwi Fitriani, NIM 126403203179, pembimbing Dr. Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengungkapan informasi yang transparan dan akuntabel dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, dan adanya teori legitimasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa diharapkan dapat memastikan bahwa dana desa tersebut telah digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 guna mewujudkan transparansi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren. (2) penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 guna mewujudkan akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa di Desa Batangsaren. (3) kesesuaian antara penerapan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Batangsaren dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tu/umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)). Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip desa seperti Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) dan web profil desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adanya tuntutan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah membantu Pemerintah Desa Batangsaren dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa. (2) penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan Pemerintah Desa Batangsaren mengelola keuangan desa secara akuntabel (3) pengelolaan dana desa di Desa Batangsaren telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dan harus memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat. Dilibatkannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi dari berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah desa.

Kata kunci: pengelolaan dana desa, permendagri nomor 20 tahun 2018, transparansi dan akuntabilitas.

ABSTRACT

This thesis entitled "Village Fund Management Based on Permendagri Number 20 of 2018 to Realize Transparency and Accountability (Study in Batangsaren Village, Kauman District, Tulungagung Regency)" was written by Elisa Dwi Fitriani, NIM 126403203179, supervisor Dr. Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.

This research is motivated by the importance of transparent and accountable information disclosure in preventing misuse of village funds, and the existence of a legitimacy theory that can encourage community participation in supervising the management of village funds is expected to ensure that the village funds have been used effectively and according to needs.

The purpose of this study is to describe (1) the implementation of Permendagri Number 20 of 2018 to realize transparency in the management of Village Funds in Batangsaren Village. (2) the implementation of Permendagri Number 20 of 2018 to realize accountability in the management of Village Funds in Batangsaren Village. (3) the suitability between the implementation of Village Fund management by the Batangsaren Village Government and Permendagri Number 20 of 2018.

This study uses a qualitative research method with a case study research type. The data used are primary and secondary data, primary data obtained from interviews with village officials (village head, village secretary, finance head, general/tutor, planning head, government head, service head, welfare head, and head of the Village Consultative Body (BPD)). While secondary data was obtained from village archives such as the Government Work Plan (RKP) and the village profile website.

The results of this study indicate that (1) the demands of Permendagri Number 20 of 2018 have helped the Batangsaren Village Government in realizing transparency in the management of village funds. (2) the implementation of Permendagri Number 20 of 2018 requires the Batangsaren Village Government to manage village finances accountably (3) the management of village funds in Batangsaren Village has been carried out in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, and must pay attention to the level of community participation. By involving the community in the decision-making process, the village government can ensure that the policies and programs implemented are in accordance with the needs and aspirations of the community. In addition, community participation can also increase transparency and accountability because it allows for monitoring and evaluation from various parties on the performance of the village government.

Keywords: village fund management, Permendagri number 20 of 2018, transparency and accountability.